

Konstruksi Legitimasi dan Resistensi dalam Pemberitaan Tambang Nikel di Raja Ampat dan Wawonii: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Muhammad Madaraja¹
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya¹
✉ madaraja04@gmail.com

Abstract:

This study examines how news discourse constructs legitimation and resistance toward nickel mining on Indonesia's small islands, focusing on Raja Ampat and Wawonii (2024–2025). The objective is to map representational strategies of key actors (state, corporations, communities, NGOs, and the press) and relate them to the sociopolitical context of nickel downstreaming and small-island protection. The research employs Critical Discourse Analysis using Fairclough's three-dimensional framework: textual (lexis, metaphors, syntax, intertextuality), discursive practice (production, circulation, reliance on authoritative sources), and sociocultural practice (policy, extractive economy, conservation). The dataset consists of purposively sampled online news (2024–2025) from national and international outlets and official releases. Findings show that legitimation discourse foregrounds procedural compliance, "good mining practice," state oversight, and geopark-boundary framing, while resistance discourse emphasizes small-island ecological vulnerability, local community rights, tourism impacts, and litigation momentum culminating in administrative sanctions. At the meso level, source dependency and ownership influence agenda-setting; at the macro level, tensions between downstreaming and conservation yield competing and shifting discourses. The study concludes that news media are not neutral observers; they actively construct a moving arena of legitimation versus resistance shaped by policy turns and legal-civic pushback.

Keywords: critical discourse analysis; Fairclough; nickel mining; legitimation; resistance

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis bagaimana praktik pemberitaan membangun legitimasi dan resistensi terhadap tambang nikel di pulau kecil Indonesia, dengan fokus pada Raja Ampat dan Wawonii (2024–2025). Tujuannya adalah memetakan strategi representasi aktor (negara, korporasi, komunitas, LSM, dan media) serta menautkannya dengan konteks sosial-politik hilirisasi nikel dan perlindungan pulau kecil. Metode yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis model Fairclough melalui tiga dimensi: tekstual (diksi, metafora, struktur sintaksis dan intertekstualitas), praktik wacana (produksi, penyebaran, sumber otoritatif), dan praktik sosial-budaya (kebijakan, ekonomi ekstraktif, konservasi). Data berupa korpus berita daring 2024–2025 dari media nasional, internasional, dan dokumen resmi yang dipilih secara purposif. Hasil menunjukkan wacana legitimasi menekankan kepatuhan prosedural, "good mining practice," pengawasan negara, serta pembungkaman batas geopark; sementara wacana resistensi menonjolkan kerentanan ekologis pulau kecil, hak komunitas lokal, dampak pada pariwisata, dan momentum litigasi yang berujung pada sanksi administratif. Pada level meso, ketergantungan pada sumber resmi dan kepemilikan media memengaruhi

penentuan agenda; pada level makro, tarik-menarik antara agenda hilirisasi dan konservasi menghasilkan wacana yang berkompetisi dan berubah. Kesimpulannya, media tidak netral: ia mengonstruksi arena legitimasi-resistensi yang bergeser mengikuti dinamika kebijakan dan perlawanan hukum-sipil.

Kata kunci: analisis wacana kritis; Fairclough; tambang nikel; legitimasi; resistensi

PENDAHULUAN

Percepatan hilirisasi nikel untuk memenuhi permintaan transisi energi global telah merekonfigurasi tata kelola sumber daya di Indonesia serta memicu dampak sosial-lingkungan yang nyata di tingkat lokal. Studi terbaru menunjukkan sentralisasi rezim tata kelola nikel, menyusutnya ruang partisipasi lokal, dan munculnya ketegangan antara urgensi dekarbonisasi dan keadilan transisi di wilayah produksi utama. Secara makro, pertumbuhan berorientasi nikel membentuk “enklave nasionalis” dalam lanskap ekstraktivisme baru, menegaskan logika industrialisasi negara dan politik sumber daya (Warburton, 2024). Kebijakan hilirisasi nikel juga dibaca sebagai strategi rasionalisasi nasionalisme sumber daya untuk menaikkan nilai tambah domestik, meski menimbulkan kontroversi atas dimensi keberlanjutan sosial-lingkungan (Santoso et al., 2024). Dalam konteks pulau kecil yang rentan, risiko pesisir dan keterpaparan ekologi menambah kerumitan tata kelola, sehingga konflik pemanfaatan ruang menjadi lebih tajam (Harahap et al., 2025).

Raja Ampat dan Wawonii merepresentasikan simpul krusial dari tarik-menarik wacana pembangunan dan konservasi. Penelitian lintas-disiplin menunjukkan bahwa perlu ada kerangka keberlanjutan pascatambang yang mengintegrasikan legitimasi institusional, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesiapan perilaku komunitas, karena dampak ekstraktif tidak berhenti pada fase operasi. Pada saat yang sama, studi tentang industri nikel menggambarkan pola konflik komunitas, relasi kuasa, dan dampak sosial yang berkelanjutan di kawasan produksi Sulawesi sejak 2020, sehingga urgensi telaah wacana media menjadi relevan untuk memahami bagaimana legitimasi maupun resistensi diproduksi dan disirkulasikan.

Namun, tinjauan literatur lima tahun terakhir memperlihatkan kesenjangan riset. Pertama, kajian kebijakan dan tata kelola nikel banyak menyoroti arsitektur nasionalisme sumber daya dan implikasi lokalnya, tetapi jarang menautkan temuan tersebut dengan analisis wacana media yang memeriksa secara sistematis strategi legitimasi dan resistensi pada konteks pulau kecil. Kedua, studi komunikasi yang menerapkan Analisis Wacana

Kritis (AWK) Fairclough di Indonesia umumnya berfokus pada isu politik-hukum non-tambang sehingga belum menguji secara komparatif konstruksi wacana nikel di media daring. Ketiga, riset yang memang memakai pendekatan kritis pada narasi “ekonomi hijau” nikel cenderung berada di level nasional atau dokumen kebijakan, belum membedah korpus pemberitaan tentang nikel di dua pulau kecil secara serentak pada rentang 2024–2025 untuk menelusuri keterkaitan dimensi mikro-teks, praktik produksi wacana, dan praktik sosial-budaya sebagaimana dianjurkan oleh model tiga dimensi Fairclough. Keempat, kajian yang ada mengenai Raja Ampat lebih banyak memakai lensa framing umum atau etika-lingkungan tanpa mengelaborasi proses produksi wacana dan intertekstualitas media dengan sumber resmi serta dokumen kebijakan pada periode mutakhir (Sani & Syamsuddin, 2025).

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini memposisikan diri untuk mengidentifikasi dan membandingkan strategi representasi aktor dalam wacana legitimasi dan resistensi pada pemberitaan nikel di Raja Ampat dan Wawonii (2024–2025), menganalisis praktik produksi/edisi dan sumber otoritatif yang menopang kedua wacana, serta menautkannya dengan konteks sosial-politik hilirisasi nikel dan perlindungan pulau kecil. Pendekatan AWK Fairclough dipilih guna memastikan keterhubungan analisis mikro, meso, dan makro sehingga temuan tidak berhenti pada permukaan teks, melainkan menunjukkan bagaimana media ikut mengonstruksi arena kebijakan yang bergerak.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian ini bertumpu pada Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough yang memandang wacana sebagai praktik sosial lintas tiga dimensi: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial-kultural; kerangka ini relevan untuk menautkan pilihan leksikal, strategi naratif, serta konfigurasi institusional dalam pemberitaan tambang nikel di pulau kecil. Dalam perdebatan publik terkait Raja Ampat, studi berbasis AWK menunjukkan bagaimana media arus utama menjadi arena hegemoni tempat legitimasi aktor mapan berhadapan dengan suara tandingan, selaras dengan tesis Fairclough tentang relasi kuasa dalam wacana (Kurniawan Nasution, 2025).

Sejumlah penelitian Indonesia lima tahun terakhir menyediakan landasan empiris dan memperlihatkan celah yang masih terbuka. Pertama, Lampe menganalisis industrialisasi nikel dan tata kelola komunikasi di kawasan Morowali; temuannya menyoroti perubahan mata pencaharian, potensi konflik sosial akibat migrasi tenaga kerja, serta kebutuhan desain komunikasi yang lebih partisipatif untuk memitigasi dampak

ekstraktif. Kajian ini kuat pada pemetaan konteks dan aktor, namun belum menelisik perangkat linguistik atau strategi legitimasi-resistensi pada level teks media (Lampe, 2021). Kedua, Nurdin dan YGP mengkaji konflik lingkungan serta gerakan perlawanan atas ekspansi nikel di Sulawesi; mereka memperlihatkan bagaimana narasi pembangunan dan otoritas negara merasionalisasi proyek, sementara gerakan sipil membangun kontra-narasi berbasis hak masyarakat dan keberlanjutan. Keterbatasannya, cakupan mediasi diskursus masih bersifat umum lintas kanal dan belum fokus pada komparasi lintas-lokasi pulau kecil (Kurniawan Nasution, 2025). Ketiga, Amelia dkk. mengevaluasi kualitas air di Sungai Pesouha (Kolaka) di sekitar operasi nikel; indikator Indeks Pencemaran dan WQI-INA menunjukkan kondisi dari baik hingga tercemar ringan, menguatkan urgensi kerangka evaluasi risiko ekologis di wilayah pesisir. Studi ini menambah bukti objektif dampak biofisik, namun tidak mengurai mekanisme wacana media yang melegitimasi atau menggugat aktivitas tambang (Amelia et al., 2025).

Berdasarkan peta tersebut, celah teoretik-empirik yang masih menganga adalah kurangnya studi komparatif lintas pulau kecil yang secara sistematis membedah strategi legitimasi dan resistensi dalam pemberitaan periode kebijakan hilirisasi terbaru. Penelitian ini mengisi celah itu dengan menerapkan model tiga dimensi Fairclough, diperkaya kategori strategi legitimasi (otorisasi, rasionalisasi, evaluasi moral, dan mitopoiesis) untuk membandingkan konstruksi makna di Raja Ampat dan Wawonii pada 2024–2025, sehingga keterhubungan antara pilihan bahasa, praktik produksi berita, dan konteks sosio-politik dapat dijelaskan dengan presisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Fairclough dalam rancangan studi kasus komparatif. Unit analisis adalah teks berita daring tentang tambang nikel pada dua pulau kecil, yakni Raja Ampat dan Wawonii, dengan rentang 1 Januari 2024 hingga 30 September 2025. Pendekatan Fairclough memadukan level mikro-teks, praktik wacana, dan praktik sosial-budaya, serta menganalisis diskursus melalui tahapan deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi (Fairclough, 2013).

Populasi mencakup seluruh berita daring bertopik tambang nikel di kedua lokasi pada periode tersebut. Sampel dipilih secara purposif dengan strategi maksimum variasi untuk menyeimbangkan sumber yang cenderung melegitimasi dan yang menonjolkan resistensi; ukuran sampel ditetapkan hingga mencapai saturasi teoretik. Purposive–

maximum variation merupakan strategi baku dalam riset kualitatif, sedangkan saturasi digunakan sebagai indikator kecukupan data (Palinkas et al., 2015).

Konstruksi analitis dioperasionalkan sebagai “variabel” untuk replikasi. Variabel independen dipahami sebagai kondisi pemroduksi wacana (tipe media; aktor dominan yang dikutip; peristiwa kebijakan kunci), sedangkan variabel dependen adalah bentuk wacana yang teramati pada teks (legitimasi dan resistensi) yang diurai melalui strategi otorisasi, rasionalisasi, evaluasi moral, dan mitopoiesis. Indikator mikro meliputi pilihan leksikal, modalitas, transitivitas, metafora, struktur judul-lead, serta pola kutipan. Kategori strategi legitimasi mengikuti taksonomi van Leeuwen.

Instrumen penelitian menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang melakukan pembacaan berulang, penandaan unit makna, penyusunan memo analitis, serta ekstraksi metadata (media, tanggal, rubrik, aktor yang dikutip, jenis artikel). Untuk konsistensi, digunakan templat ekstraksi data dan matriks ringkas untuk menangani kasus ambigu; tidak disusun buku kode formal.

Prosedur meliputi penelusuran dan pemilahan (identifikasi artikel sesuai kriteria, pengisian URL/tanggal/penulis/media), pra-analisis (pembersihan teks dan penandaan unit makna), kategorisasi (pemetaan strategi legitimasi/resistensi dan fitur mikro-teks), serta interpretasi–eksplanasi (pemetaan praktik produksi wacana dan penautan pada konteks kebijakan hilirisasi, tata kelola pulau kecil, dan konflik pemanfaatan ruang). Kutipan kunci disimpan beserta konteks paragrafnya untuk memastikan keterlacakan.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh teks dari laman resmi media dan kanal pemerintah, mencatat metadata terstruktur, serta mengarsipkan salinan PDF/HTML untuk mencegah kehilangan akses. Dokumen kebijakan, siaran pers, dan putusan pengadilan dihimpun sebagai bahan triangulasi pada tahap eksplanasi. Analisis data mengikuti tiga tahap AWK Fairclough: deskripsi (fitur kebahasaan dan retorika teks), interpretasi (praktik produksi dan sirkulasi termasuk sumber otoritatif dan rutinitas redaksional), serta eksplanasi (relasi kuasa dan ideologi pada tataran sosial-budaya) (Fairclough et al., 1989).

Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber (media nasional, internasional, dan kanal resmi), pembacaan sejawat terhadap sebagian korpus untuk menguji konsistensi interpretasi, jejak audit (arsip teks, keputusan analitis, memo reflektif), serta reflektivitas peneliti. Triangulasi dan kriteria *trustworthiness* yang meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* digunakan sebagai acuan

kualitas penelitian kualitatif. Pertimbangan etis mencakup penggunaan materi yang tersedia untuk publik, atribusi dan sitasi akurat, kehati-hatian pada identitas komunitas lokal, dan penyajian temuan tanpa mendistorsi konteks teks asli (Fusch et al., 2018).

PEMBAHASAN

Kerangka Pembacaan

Pembacaan menggunakan model Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough: level mikro (fitur kebahasaan teks), meso (praktik produksi dan sirkulasi wacana), dan makro (konteks sosial-budaya/politik). Kerangka ini dipakai untuk menelusuri bagaimana legitimasi dan resistensi terhadap tambang nikel di pulau kecil dikonstruksi, dipertukarkan, dan ditandingi di media.

Gambaran Korpus dan Konteks Kasus

Korpus berisi 16 artikel (8 Raja Ampat; 8 Wawonii) dari media nasional, internasional, serta kanal resmi pemerintah dalam rentang 1 Januari 2024–30 September 2025. Seleksi bersifat purposif dengan variasi maksimum untuk menangkap dua arus wacana: legitimasi dan resistensi. Dinamika kebijakan pada Juni 2025 (penyegelan/pencabutan sebagian izin) memicu lonjakan liputan yang cenderung menguatkan wacana resistensi; ini dicatat sebagai konteks pergeseran agenda.

Tabel 1. Korpus Berita 2024–2025

Lokasi	Tanggal	Media	Jenis	Judul ringkas	Perspektif
Wawonii	21 Mar 2024	DetikNews	News	MK tolak gugatan PT GKP soal pesisir/pulau kecil	Resistensi
Wawonii	17 Jun 2025	CNN Indonesia	News	Kemenhut cabut izin tambang di kawasan hutan Wawonii (GKP)	Resistensi
Wawonii	17 Jun 2025	ANTARA	News	Dirjen PKTL: IPPKH Wawonii dicabut karena putusan MA	Resistensi
Wawonii	14 Okt 2024	MA (Direktori Putusan)	Dokumen	Putusan kasasi 403 K/TUN/TF/2024 terkait IPPKH GKP	Resistensi
Wawonii	21 Nov 2024	Betahita	Investigasi	Respons GKP pasca putusan MK dinilai	Resistensi

Lokasi	Tanggal	Media	Jenis	Judul ringkas	Perspektif
				“mengakali” ketentuan pulau kecil	
Wawonii	8 Feb 2025	Betahita	News	Warga Wawonii laporkan PT GKP; rangkum kronologi hukum	Resistensi
Wawonii	22 Jan 2025	Kumparan (Kendari)	News	GKP ajukan PK; klaim patuh regulasi	Legitimasi
Wawonii	27 Mar 2024	FWI	Rilis analisis	Ringkasan putusan MK 35/2023 dan implikasi pulau kecil	Resistensi
Raja Ampat	10 Jun 2025	Kementerian ESDM	Siaran pers	Pemerintah cabut 4 IUP nikel di Raja Ampat	Resistensi (kebijakan)
Raja Ampat	10 Jun 2025	Setneg/Setkab	Siaran pers	Pemerintah umumkan pencabutan 4 IUP; daftar perusahaan	Resistensi (kebijakan)
Raja Ampat	10 Jun 2025	Reuters	News internasional	4 izin dicabut pasca protes; Gag Nikel tetap berizin	<i>Mixed</i>
Raja Ampat	10 Jun 2025	AP News	News internasional	Pemerintah setop operasi 4 tambang nikel di destinasi selam	Resistensi
Raja Ampat	10 Jun 2025	DetikFinance	News	APNI: PT Gag jalankan kaidah tambang (GMP/PROPER)	Legitimasi
Raja Ampat	12 Jun 2025	ANTARA	News	Pemkab tutup akses Wayag akibat pemalangan warga	Resistensi
Raja Ampat	18 Sep 2025	CNBC Indonesia	News	ESDM jelaskan mengapa Gag Nikel diizinkan operasi (audit lingkungan)	Legitimasi
Raja Ampat	25 Sep 2025	The Jakarta Post	News	NGOs serukan penghentian penuh; dampak lingkungan berlanjut	Resistensi

Analisis mikrostruktural (teks)

1. Raja Ampat

Judul dan lead dari kanal resmi dan media internasional menonjolkan verba tindakan “cabut,” “setop,” “segel”, yang memposisikan negara sebagai pelaku aktif dan tambang sebagai objek tindakan. Modus deklaratif dan modalitas pasti mempertebal efek kepastian kebijakan. Artikel legitimasi menonjolkan diksi teknokratik seperti “audit lingkungan,” “good mining practice,” “pengawasan ketat,” serta penanda ruang “di luar Geopark” untuk merasionalisasi kelanjutan izin PT Gag Nickel. Pola kutipan cenderung mengawali dengan pejabat/pengurus asosiasi (otorisasi), sementara suara komunitas hadir terutama pada liputan dampak sosial (penutupan akses Wayag).

2. Wawonii

Judul dan lead didominasi istilah legal-administratif (“putusan,” “kabutkan izin,” “IPPKH,” “laporkan”), mengikat resistensi pada otoritas hukum. Transitivity mengangkat MK/MA/KLHK sebagai agen sah dan perusahaan sebagai pasien kebijakan. Intertekstualitas kuat melalui rujukan berulang pada putusan MK 35/2023 dan kasasi TUN, memperkuat legitimasi resistensi. Modalitas evaluatif muncul dalam liputan investigatif yang menilai respons korporasi sebagai inkonsisten dengan norma pulau kecil.

Analisis mesostruktural (praktik wacana)

Kanal resmi (ESDM, Setneg/Setkab) berperan sebagai penentu agenda: rilis kebijakan menjadi rujukan primer yang direproduksi media nasional dan internasional. Media internasional (Reuters, AP) mengamplifikasi isu dengan bingkai reputasi global Raja Ampat (destinasi selam, geopark) sehingga resistensi memperoleh kapital simbolik lintas negara. Media ekonomi (DetikFinance, CNBC) menyediakan ruang legitimasi bagi narasi teknokratis (kepatuhan, audit, kinerja lingkungan), sementara media lingkungan/komunitas (Betahita) memperluas bukti resistensi melalui kronologi konflik dan dampak lokal. Pola ini menunjukkan ketergantungan sumber otoritatif di hulu dan diferensiasi framing di hilir sesuai orientasi redaksional.

Analisis makrostruktural (praktik sosial-budaya)

Di tingkat makro, tarik-menarik antara hilirisasi nikel dan perlindungan pulau kecil/konservasi membentuk arena wacana yang bergerak. Raja Ampat menampilkan kompromi kebijakan: pencabutan empat IUP untuk merespons tekanan sosial-ekologis, namun kelanjutan PT Gag Nickel diletakkan pada justifikasi spasial dan compliance teknis. Wawonii menunjukkan institusionalisasi resistensi melalui rantai putusan MK–MA–pencabutan eksekutif, menegaskan peran hukum sebagai otorisasi resistensi. Ekonomi pariwisata dan identitas “surga bahari” memperkuat argumen moral resistensi di Raja Ampat; sebaliknya, diskursus nilai tambah nasional dan formalitas kepatuhan mendukung legitimasi di kanal ekonomi.

Pemetaan strategi legitimasi vs resistensi

1. Otorisasi

Resistensi: bertumpu pada putusan MK/MA, pernyataan pejabat teknis (Dirjen PKTL), dan tindakan administratif (penyegelan/pencabutan).

Legitimasi: bersandar pada otoritas teknokratik (ESDM), asosiasi industri (APNI), serta klaim kepatuhan korporasi.

2. Rasionalisasi

Resistensi: argumentasi kerentanan ekologi pulau kecil, risiko pada pariwisata, dan kepatuhan terhadap norma tata ruang/konservasi.

Legitimasi: penekanan pada audit lingkungan, compliance, good mining practice, dan batas geopark untuk membatasi ruang masalah. Resistensi: metafora “surga selam,” “warisan,” “kepulauan rapuh” membangun klaim nilai dan tanggung jawab antargenerasi. Legitimasi: nilai pembangunan, kedaulatan sumber daya, peningkatan nilai tambah muncul sebagai pembenaran moral.

Mitopoiesis (narasi teladan)

Resistensi: kisah komunitas menutup akses Wayag dan advokasi LSM menghidupkan narasi perlindungan terakhir. Legitimasi: kisah perusahaan patuh dan diawasi ketat berfungsi sebagai teladan “pertambangan baik.” Secara distribusi, dari 16 item: resistensi dominan (± 12), legitimasi (± 3), dan *mixed* (1). Dominasi ini selaras dengan kejadian kebijakan Juni 2025 yang memang menegaskan tindakan sanksi; pembahasan menjaga keberimbangan melalui pembacaan sumber ekonomi/teknokratik pada sisi legitimasi.

Perbandingan lintas Lokasi

Raja Ampat memperlihatkan ambivalensi kebijakan: tindakan sanksi kuat berdampingan dengan ruang kelanjutan operasi satu perusahaan melalui justifikasi teknis-spasial. Framing internasional memperbesar bobot reputasi ekologis. Wawonii lebih linear: rangkaian hukum yang konsisten menguatkan resistensi hingga eksekusi administratif; legitimasi korporasi hadir, namun kalah kuat dibanding otorisasi yudisial dan eksekutif. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa sumber otoritatif menentukan arah wacana awal, sementara media tematik mengisi detail dampak dan konflik.

Implikasi dan keterbatasan

Secara teoretik, temuan menegaskan kegunaan AWK Fairclough untuk menghubungkan fitur bahasa dengan praktik produksi dan struktur kebijakan pada isu ekstraktivisme di pulau kecil. Kebijakan perlu memperhatikan komunikasi publik berbasis bukti yang transparan soal dasar penetapan izin, batas kawasan, dan hasil audit, agar legitimasi tidak hanya prosedural. Keterbatasan studi terletak pada ukuran korpus (16 item) dan horizon waktu; bias peristiwa (*event-driven*) dapat menggeser proporsi wacana. Riset lanjutan dapat memperluas korpus, memasukkan analisis jaringan sumber dan komparasi lintas media daerah, serta triangulasi dengan wawancara produsen berita.

SIMPULAN

Penelitian ini menelaah bagaimana wacana media mengonstruksi legitimasi dan resistensi terhadap tambang nikel di Raja Ampat dan Wawonii pada periode 2024–2025. Dengan Analisis Wacana Kritis model Fairclough, korpus 16 artikel dari media nasional, internasional, dan kanal resmi dianalisis pada tiga tataran: mikro (fitur kebahasaan), meso (praktik produksi-sirkulasi wacana), dan makro (konteks sosial-politik hilirisasi nikel serta perlindungan pulau kecil). Pada level mikro, wacana resistensi dicirikan oleh diksi legal-administratif dan evaluatif seperti “mencabut,” “menyegel,” “putusan,” serta metafora nilai lingkungan dan warisan; sebaliknya, wacana legitimasi menonjolkan leksikon teknokratik “audit,” “good mining practice,” “kepatuhan,” dan penanda spasial “di luar Geopark.” Pada level meso, kanal resmi pemerintah bertindak sebagai penentu agenda yang direplikasi media arus utama, sementara media ekonomi mengartikulasikan legitimasi berbasis kepatuhan, dan media lingkungan mengamplifikasi resistensi berbasis dampak komunitas. Pada level makro, tarik-menarik antara proyek hilirisasi nikel dan konservasi pulau kecil menghasilkan arena wacana yang bergerak: kebijakan sanksi terhadap sebagian izin hidup berdampingan dengan narasi kelanjutan operasi melalui justifikasi teknis-spasial.

Perbandingan lintas lokasi menunjukkan Raja Ampat merepresentasikan ambivalensi kebijakan: pencabutan sebagian izin dibarengi pembenaran kelanjutan satu perusahaan melalui klaim kepatuhan dan batas kawasan. Wawonii memperlihatkan institusionalisasi resistensi yang lebih linier, dengan rangkaian putusan yudisial diikuti eksekusi administratif yang memperkuat delegitimasi operasi. Secara keseluruhan, media bukan sekadar cermin peristiwa, melainkan aktor diskursif yang, melalui pilihan bahasa

dan sumber, ikut membentuk persepsi publik tentang apa yang sah (legitimate) dan apa yang patut ditolak (resisted). Temuan ini menegaskan relevansi kerangka Fairclough untuk menghubungkan bentuk bahasa dengan praktik produksi wacana dan struktur kebijakan pada isu ekstraktivisme di pulau kecil. Implikasi praktisnya, transparansi komunikasi kebijakan perlu melampaui klaim prosedural menuju bukti substantif mengenai dasar izin, batas kawasan, dan hasil audit, agar legitimasi tidak berhenti pada tataran retorik. Keterbatasan penelitian mencakup ukuran korpus dan horizon waktu yang event-driven; riset lanjutan disarankan memperluas korpus lintas media daerah, menambahkan analisis jaringan sumber, serta menggabungkan wawancara produsen berita untuk memperdalam pembacaan praktik redaksional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, F. R., Effendi, H., Kurniawan, B., Andrianto, C., & Ahmady, T. (2025). Analisis kualitas air dan limbah pertambangan nikel di Sungai Pesouha, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 1–14. <https://doi.org/10.36813/jplb.9.1.1-14>
- Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis*.
- Fairclough, N., Hatirn, B., Mason, I., Tollefson, J. W., Stephens, J., Lesser, R., Milroy, L., Gibbons, J., Baynham, M., Pennycook, A., Talbot, M., & Fairclough, N. (1989). *Language and power Discourse and the translator Planning language, planning inequality Linguistics and aphasia Language and the law Literacy practices The cultural politics of English as an international language Fictions at work: language and social practice in fiction Language and power*.
- Fusch, P., Fusch, G. E., & Ness, L. R. (2018). Denzin's Paradigm Shift: Revisiting Triangulation in Qualitative Research. *Journal of Social Change*, 10(1). <https://doi.org/10.5590/josc.2018.10.1.02>
- Harahap, R., Masselink, G., & Boulton, S. J. (2025). A coastal risk analysis for the outermost small islands of Indonesia: A multiple natural hazards approach. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 121. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2025.105377>
- Kurniawan Nasution, A. (2025). Environmental Conflict Communication PBNU and Activist Perspectives on Mining in Raja Ampat: A Discourse Analysis of the ROSI Kompas TV Broadcast. In | *International Journal of Environmental Communication* (Vol. 3, Issue 1).
- Lampe, I. (2021). Isu-isu industrialisasi nikel dan pengelolaan komunikasi korporat di kawasan industri Morowali. *PRofesi Humas*, 6(1), 1–22.

- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Sani, H., & Syamsuddin, S. (2025). Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3453–3461. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1041>
- Santoso, R. B., Dermawan, W., & Moenardy, D. F. (2024). Indonesia's rational choice in the nickel ore export ban policy. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2400222>
- Warburton, E. (2024). Nationalist enclaves: Industrialising the critical mineral boom in Indonesia. *Extractive Industries and Society*, 20. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101564>
- ANTARA. (2025, June 17). *Dirjen PKTL: IPPKH Wawonii dicabut karena putusan MA*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com>
- ANTARA. (2025, June 12). *Pemkab tutup akses wisata Wayag akibat pemalangan warga*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com>
- AP News. (2025, June 10). *Indonesia stops nickel mining operations at top diving destination*. AP News. <https://apnews.com>
- Betahita. (2024, November 21). *Respons GKP pasca putusan MK dinilai "mengakali" ketentuan pulau kecil*. Betahita. <https://www.betahita.id>
- Betahita. (2025, February 8). *Warga Wawonii laporkan PT GKP ke polisi; rangkum kronologi hukum*. Betahita. <https://www.betahita.id>
- CNN Indonesia. (2025, June 17). *Kemenhut cabut izin tambang di kawasan hutan Wawonii (GKP)*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com>
- CNBC Indonesia. (2025, September 18). *ESDM jelaskan mengapa Gag Nikel diizinkan operasi untuk audit lingkungan*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com>
- DetikFinance. (2025, June 10). *APNI: PT Gag jalankan kaidah tambang (GMP/PROPER)*. DetikFinance. <https://finance.detik.com>
- DetikNews. (2024, March 21). *MK tolak gugatan PT GKP soal pesisir/pulau kecil*. DetikNews. <https://news.detik.com>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. (2024, October 14). *Putusan kasasi 403 K/TUN/TF/2024 terkait IPPKH PT GKP*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Forest Watch Indonesia (FWI). (2024, March 27). *Ringkasan putusan MK 35/2023 dan implikasi untuk pulau kecil*. FWI. <https://fwi.or.id>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). (2025, June 10). *Pemerintah cabut 4 IUP nikel di Raja Ampat* (Press Release No. 054.Pers/2025). <https://www.esdm.go.id>

Kumparan Kendari. (2025, January 22). *GKP ajukan PK; klaim patuh regulasi dan kewajiban lingkungan-sosial*. Kumparan. <https://kumparan.com>

Reuters. (2025, June 10). *Indonesia revokes nickel ore mining permits in Raja Ampat after protest*.

Reuters. <https://www.reuters.com>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2025, June 10). *Pemerintah umumkan pencabutan empat izin usaha pertambangan nikel di Raja Ampat*. Setkab RI. <https://setkab.go.id>

The Jakarta Post. (2025, September 25). *NGOs: Nickel mining continues to damage Raja Ampat*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com>